



Moderasi Ukuran Pemerintah Daerah pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi

Muhammad Azizi Yusuf¹, Diah Hari Suryaningrum²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

E-mail: 18013010106@student.upnjatim.ac.id¹⁾
diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id²⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 19 February
2022
Received in Revised
19 April 2022
Accepted 25 April
2022

Keyword's :
Kemandirian
Keuangan Daerah,
Investasi daerah,
Transparansi Daerah,
Tingkat Korupsi,
Ukuran Pemerintah
Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of regional financial independence, local investment, and transparency on the level of corruption moderated by the local government size. The study population is 34 Provincial governments in Indonesia from 2016 to 2020. The sample is selected using census techniques. The data analysis technique is multiple linear regression analysis and moderated regression analysis using Stastical Product and Service Solution 25 software. The results state that regional financial independence affects the corruption level, whilst local investment and transparency don't affect the level of corruption. Then the local government size moderates the effect of regional financial independence on the level of corruption. Otherwise, local government size doesn't moderate local investment and transparency on affected the level of corruption.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh dari kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu kemandirian keuangan daerah dan investasi daerah, serta transparansi daerah terhadap tingkat korupsi yang dimoderasi oleh ukuran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020 dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan bantuan aplikasi *Stastical Product and Service Solution* versi 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sedangkan investasi daerah dan transparansi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Kemudian ukuran pemerintah daerah memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat korupsi dan ukuran pemerintah daerah tidak memoderasi pengaruh investasi daerah dan transparansi daerah terhadap tingkat korupsi.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author

E-mail address: diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id

Peer review under responsibility of *Akuisisi : Accounting Journal*. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Berdasarkan riset yang dilakukan *Transparency International*, tindak korupsi di Indonesia lebih banyak terjadi pada sektor pemerintahan dibandingkan sektor lainnya (Suyatmiko & Nicola, 2021). Laporan tren penindakan korupsi tahun 2016-2020 yang diterbitkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan jumlah kasus korupsi relatif mengalami penurunan, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah tersangka yang terlibat dan nilai kerugian negara. Penggelapan dana masyarakat merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan daerah, diikuti praktik proyek fiktif, *mark-up*, manipulasi laporan, dan penyalahgunaan wewenang (Indonesia Corruption Watch, 2021). Dari sudut pandang teori agensi, praktik tersebut merupakan bentuk kecurangan terhadap kewajiban dan tanggung jawab pemerintah atas mandat yang diberikan rakyat dalam konsep demokrasi (Jensen & Meckling, 1976; Warkini, Bawono, & Restianto, 2020).

Kasus korupsi di daerah berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran. Penelitian Priatnasari & Suhardjanto (2020), Kiswanto *et al.* (2019), dan Heriningsih & Marita (2013) menyatakan adanya keterkaitan antara kasus korupsi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kinerja keuangan daerah yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat korupsi adalah kemandirian keuangan daerah dan tingkat investasi daerah.

Tingkat kemandirian yang tinggi menggambarkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai operasionalnya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menggantungkan pada pembiayaan, baik dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan maupun dari pinjaman dari sesama pemda atau pihak eksternal lainnya (Halim, 2007). Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah mengindikasikan besarnya alokasi PAD yang digunakan untuk membiayai operasional daerah. Nominal PAD yang besar menambah kompleksitas aturan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pendapatan yang besar dan tingginya kompleksitas aturan keuangan memunculkan kesempatan untuk melakukan praktik korupsi. Selain pendapatan daerah, alokasi belanja daerah juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi seperti pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan investasi (Priatnasari & Suhardjanto, 2020).

Investasi daerah yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana publik, serta pembelian/pembangunan aset tetap lainnya rawan akan praktik korupsi (Simorangkir, 2017). Dana investasi daerah untuk aset tetap dianggarkan pada pos belanja modal. Menurut Priatnasari & Suhardjanto (2020), apabila perbandingan belanja modal terhadap total belanja daerah semakin tinggi, maka kemungkinan adanya korupsi dalam alokasi belanja modal juga semakin kuat. Selain dari sisi pengelolaan

keuangan daerah, tata kelola pemerintahan daerah dinilai juga memiliki pengaruh terhadap kasus korupsi.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* berupaya menciptakan *public servicing* yang lebih baik, salah satunya dengan cara mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan dana masyarakat melalui prinsip keterbukaan atau transparansi. Berdasarkan hasil riset Lafe & Shahini (2019), Priatnasari & Suhardjanto (2020), dan Warkini *et al.* (2020), menyatakan terdapat hubungan antara kasus korupsi dan transparansi daerah. Lafe & Shahini (2019) mengungkapkan bahwa transparansi daerah berpengaruh dalam upaya mengurangi jumlah kasus korupsi. Transparansi dalam informasi maupun kinerja pengelolaan daerah meningkatkan kontrol dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meningkatnya pengawasan dari publik terhadap pemerintahan daerah merupakan upaya preventif untuk menekan jumlah praktik korupsi (Kementerian PPN / Bappenas, 2018).

Kemudian, penelitian Kiswanto *et al.* (2019) menjelaskan ukuran pemerintah daerah dapat menaikkan (memoderasi) kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah merupakan proksi dari total aset daerah (Aulia & Rahmawaty, 2020; Patrick, 2007). Kiswanto *et al.* (2019) dan Sugiarto (2019), mengungkapkan ukuran pemerintah daerah (total aset daerah) yang dioptimalkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi aset tetap daerah dapat meningkatkan tingkat investasi di daerah dengan tersedianya fasilitas dan sarana pendukung investasi yang mempermudah pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Naiknya tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat investasi daerah dapat meningkatkan potensi kasus korupsi pada Pemerintah Daerah. Selain memoderasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, ukuran pemerintah daerah yang besar mampu meningkatkan (memoderasi) tata kelola pemerintah yang baik (Nainggolan & Purwanti, 2016; Sari, 2016).

Tuntutan tata kelola pemerintah daerah yang baik dapat dipicu *local government size* yang besar (Nainggolan & Purwanti, 2016). Besarnya ukuran pemerintah daerah khususnya pada pengelolaan aset tetap menimbulkan sikap keingintahuan yang tinggi dari publik. Publik ingin mengawasi dan memastikan pemanfaatan aset tetap daerah untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan aset oleh pengelola daerah. Selain itu, aset pemerintah daerah yang digunakan secara optimal dapat menunjang dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam rangka transparansi informasi publik (Sari, 2016). Semakin tingginya tingkat transparansi pengelolaan daerah terhadap publik, semakin rendah pula potensi korupsi dalam pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan penelitian terdahulu pada uraian sebelumnya, dapat ditarik hipotesis penelitian yaitu Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Investasi Daerah (X2), dan Transparansi Daerah (X3) berpengaruh terhadap Tingkat Korupsi (Y). Kemudian Ukuran

Pemerintah Daerah (Z) memoderasi pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Investasi Daerah (X2), dan Transparansi Daerah (X3) terhadap Tingkat Korupsi (Y).

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian adalah Kemandirian Keuangan Daerah (X1), Investasi Daerah (X2), Transparansi Daerah (X3), Tingkat Korupsi (Y), dan Ukuran Pemerintah Daerah (Z). Operasionalisasi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini disajikan sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
2	Investasi Daerah	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	Rasio
3	Transparansi Daerah	Pemerintah Provinsi yang mempublikasi informasi terkait penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan LKPD pada <i>website</i> pemerintah daerahnya maka dinilai dengan 1, sedangkan Pemerintah Provinsi yang tidak memenuhi ketiga kriteria minimum tersebut dinilai dengan 0.	Dummy
4	Tingkat Korupsi	Jumlah kasus korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun tertentu.	Rasio
5	Ukuran Pemerintah Daerah	$\text{Ln}(\text{Total Aset Pemerintah Daerah})$	Rasio

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik konsensus dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Sehingga total sampel adalah 170 Pemerintah Daerah (34 Pemprov X 5 tahun). Data atau informasi penelitian bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi, *website* masing-masing Pemerintah Provinsi, dan *website* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) www.kpk.go.id.

Teknik analisis dan uji hipotesis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang selanjutnya disebut dengan model 1 dan analisis regresi moderasi yang selanjutnya disebut model 2 dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar deviasi
Kemandirian keuangan daerah (X1)	170	3,129	0,070	0,705	0,516
Investasi daerah (X2)	170	0,407	0,052	0,202	0,068
Transparansi Daerah (X3)	170	1	0	0,360	0,483
Tingkat Korupsi (Y)	170	37	0	2,970	5,680
Ukuran pemerintah daerah (Z)	170	33,640	28,055	29,868	0,952

Berdasarkan tabel 2 hasil uji statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut.

1. Nilai kemandirian keuangan daerah tertinggi dan terendah adalah 3,129 dan 0,070. Nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah adalah 0,705 dan standar deviasinya 0,516.
2. Tingkat investasi daerah tertinggi adalah 0,407, sementara tingkat terendahnya berada pada tingkat 0,052. Rata-rata tingkat investasi daerah adalah 0,202 dan memiliki nilai standar deviasi 0,068.
3. Nilai maksimum 1 pada variabel transparansi daerah mencerminkan Pemerintah Daerah yang transparan. Sedangkan nilai minimum 0 mencerminkan Pemerintah Daerah yang tidak transparan. Nilai rata-rata dan standar deviasi transparansi daerah adalah 0,360 dan 0,483.
4. Tingkat korupsi tertinggi bernilai 37 dan tingkat terendahnya adalah 0. Rata-rata tingkat korupsi adalah 2,970 dan nilai standar deviasinya 5,680.
5. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai tertinggi 33,640 dan nilai terendah 28,055. Rata-rata dan standar deviasi variabel ukuran pemerintah daerah adalah 29,868 dan 0,952.

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi syarat atau lolos uji asumsi klasik, meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji asumsi klasik telah dilakukan dengan hasil model 1 dan model 2 telah lolos uji asumsi klasik.

Hasil uji hipotesis model 1

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu kemandirian keuangan daerah (X1), investasi daerah (X2), dan transparansi daerah (X3) terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi (Y).

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		<i>Coefficients</i>		
Model	Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
1	<i>(Constant)</i>	2,604	1,676	
	X1	3,508	0,879	0,278
	X2	-10,528	6,436	-0,126
	X3	0,930	0,908	0,079
<i>Std. Error of The Estimate</i>		5,304		

Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana yang terdapat pada tabel 3, model 1 dari persamaan regresi adalah sebagai berikut.

$$Y = 2,604 + 0,278X_1 - 0,126X_2 + 0,079X_3 + 5,304 \dots(1)$$

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F Model 1

		ANOVA				
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	782,755	3	260,918	9,274	0,000
	<i>Residual</i>	4670,098	166	28,133		
	<i>Total</i>	5452,853	169			

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jika nilai probabilitas uji $F < 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan sebaliknya (Ghozali, 2018). Berdasarkan tabel 4 nilai F hitung sebesar 9,274 dengan probabilitas 0,000 maka dapat dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah (X1), investasi daerah (X2), dan transparansi daerah (X3) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Y).

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1

		<i>Model Summary</i>		
Model	<i>R</i>	<i>R²</i>	<i>Adjusted R²</i>	<i>Std. Error of The Estimate</i>
1	0,379	0,144	0,128	5,304

Berdasarkan tabel 5 nilai *Adjusted R²* model 1 adalah 0,128 atau 12,8%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan 13% oleh variabel independen dalam penelitian, sedangkan 87% dijelaskan variabel diluar penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik T Model 1

Model	Variabel	Coefficients		Kesimpulan
		<i>t</i>	<i>Sig.</i>	
1	(Constant)	1,553	0,122	
	X1	3,478	0,001	Berpengaruh
	X2	-1,636	0,104	Tidak berpengaruh
	X3	1,023	0,308	Tidak berpengaruh

Menurut informasi pada tabel 6 hasil uji statistik t untuk model 1 diketahui bahwa:

1. Nilai *t test* untuk variabel kemandirian keuangan daerah adalah 0,001. Nilai *t test* tersebut < 0,05 yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah (X1) berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Y).
2. Nilai *t test* untuk variabel investasi daerah adalah 0,104. Nilai *t test* tersebut > 0,05 yang menyatakan bahwa investasi daerah (X2) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Y).
3. Nilai *t test* untuk variabel transparansi daerah adalah 0,308. Nilai *t test* tersebut > 0,05 yang menyatakan bahwa transparansi daerah (X3) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Y).

Hasil uji hipotesis model 2

Analisis regresi moderasi dengan uji interaktif merupakan analisis yang di dalamnya terdapat dua perkalian atau lebih variabel bebas. Pada penelitian ini uji regresi digunakan untuk mengetahui variabel moderasi yaitu ukuran pemerintah daerah (Z) memoderasi atau tidak pengaruh variabel independen meliputi kemandirian keuangan daerah (X1), investasi daerah (X2), dan transparansi daerah (X3) terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi (Y).

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Model	Variabel	Coefficients		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>
2	(Constant)	1,011	1,229	
	X1	0,260	0,267	0,011
	X2	-2,530	1,378	-0,232
	X3	-0,095	0,196	-0,061
	X1Z	0,622	0,239	0,307
	X2Z	0,281	0,171	0,202
	X3Z	0,166	0,089	0,243
	<i>Std. Error of The Estimate</i>		0,699	

Hasil analisis regresi moderasi sebagaimana yang terdapat pada tabel 7, model 2 dari persamaan regresi adalah sebagai berikut.

$$Y = 1,011 + 0,011X_1 - 0,232X_2 - 0,061X_3 + 0,307X_1Z + 0,202X_2Z + 0,243X_3Z + 0,699 \dots(2)$$

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F Model 2

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
2	Regression	20,472	6	3,412	6,985	0,000
	Residual	76,697	157	0,489		
	Total	97,169	163			

Berdasarkan tabel 8 nilai *F test* sebesar 6,985 dengan probabilitas 0,000 maka dapat dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah (X1), investasi daerah (X2), transparansi daerah (X3), interaksi ukuran pemerintah daerah dengan kemandirian keuangan daerah (X1Z), interaksi ukuran pemerintah daerah dengan investasi daerah (X2Z), dan interaksi ukuran pemerintah daerah dengan transparansi daerah (X3Z) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi (Y).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2

Model Summary				
Model	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of The Estimate
2	0,459	0,211	0,181	0,698937886167955

Infomasi pada tabel 9 menyatakan nilai *Adjusted R²* model 2 adalah 0,181 atau 18,1%. Nilai tersebut menggambarkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan 18% oleh variabel independen dalam penelitian, sedangkan 82% dijelaskan variabel diluar penelitian.

Tabel 10. Hasil Uji Statistik T Model 2

Coefficients				
Model	Variabel	t	Sig.	Kesimpulan
2	(Constant)	0,823	0,412	
	X1	0,097	0,923	Tidak berpengaruh
	X2	-1,836	0,068	Tidak berpengaruh
	X3	-0,486	0,628	Tidak berpengaruh
	X1Z	2,602	0,010	Berpengaruh
	X2Z	1,642	0,103	Tidak berpengaruh
	X3Z	1,872	0,063	Tidak berpengaruh

Berdasarkan tabel 10 hasil uji statistik t yang mencerminkan ada atau tidaknya pengaruh variabel moderasi pada variabel independen adalah:

1. Nilai t hitung untuk variabel interaksi antara ukuran pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah adalah 0,010. Nilai tersebut < 0,05 yang menyatakan bahwa ukuran

- pemerintah daerah (Z) memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah (X1) terhadap tingkat korupsi (Y).
2. Nilai t hitung untuk variabel interaksi antara ukuran pemerintah daerah dan investasi daerah adalah 0,103. Nilai tersebut $> 0,05$ yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (Z) tidak memoderasi pengaruh investasi daerah (X2) tingkat korupsi (Y).
 3. Nilai t hitung untuk variabel interaksi antara ukuran pemerintah daerah dan transparansi daerah adalah 0,063. Nilai tersebut $> 0,05$ yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (Z) tidak memoderasi pengaruh transparansi daerah (X3) terhadap tingkat korupsi (Y).

Pembahasan

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi

Hasil pengujian pada model 1 menyatakan adanya pengaruh signifikan kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat korupsi. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Priatnasari & Suhardjanto (2020) dan Kiswanto *et al.* (2019) yang menyatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sebaliknya, hasil penelitian Ahyaruddin & Amrillah (2018) menyatakan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahannya dengan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada sumber dana yang berasal dari eksternal daerah. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah yang berasal dari transfer dan pinjaman. Tingginya tingkat kemandirian keuangan daerah mengindikasikan PAD yang besar, dan dapat menambah kompleksitas aturan keuangan.

Pendapatan yang besar dan kompleksnya aturan keuangan meningkatkan peluang terjadinya korupsi (Bondan, 2019). Bertambahnya kasus korupsi menunjukkan *conflict of interest* yang tinggi antara rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat korupsinya yang menunjukkan tingginya *conflict of interest* antara *agent* dan *principal* karena semakin banyak penyelewengan mandat yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *agent*.

Pengaruh Investasi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan tabel 6, hasil pengujian menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh investasi daerah terhadap tingkat korupsi. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Penelitian Priatnasari &

Suhardjanto (2020) yang menyatakan investasi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan hasil penelitian Kim (2019) menyatakan investasi berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Tidak ditemukannya pengaruh investasi daerah terhadap tingkat korupsi dikarenakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak dapat mendeteksi tindak korupsi secara keseluruhan, terutama tindak korupsi yang terjadi diluar pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah seperti praktik suap pemenang tender pembangunan infrastruktur publik, kecurangan kontrak pembangunan, penggelapan barang untuk keperluan publik dan lain sebagainya (Bondan, 2019).

Berdasarkan teori agensi, tidak dapat mendeteksinya investasi daerah terhadap tingkat korupsi menunjukkan keterbatasan/ketidakmampuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menganalisis konflik kepentingan (korupsi) antara rakyat dan pemerintah. Disisi lain, terdapat tindak korupsi yang tidak dapat dideteksi dari aspek LKPD seperti praktik suap-menyuap, kecurangan kontrak, manipulasi laporan, dan bentuk korupsi lainnya yang mana jelas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.

Pengaruh Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi

Hasil uji pada model 1 menyatakan tidak adanya pengaruh transparansi daerah terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Priatnasari & Suhardjanto (2020) yang menyatakan transparansi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan hasil penelitian Lafe & Shahini (2019) menyatakan transparansi publik berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Hasil tersebut disebabkan informasi yang dipublikasi pada *website* pemerintah daerah masih terbatas dan belum dapat mendeteksi secara akurat peluang terjadinya praktik korupsi dari sudut pandang pengelolaan anggaran daerah dan laporan keuangan. Informasi pada aspek keterbukaan harus disajikan secara lengkap, tepat, relevan dengan tujuannya, tidak menyesatkan, tepat waktu, dan mudah diakses oleh publik (Georgieva, 2017). Sehingga variabel transparansi daerah dalam penelitian ini tidak dapat mencegah upaya tindak korupsi di pemerintah daerah.

Terbatasnya informasi yang dipublikasi pada *website* Pemerintah Daerah berdampak pada tidak terdeteksinya kasus korupsi. Hal tersebut secara teori agensi menunjukkan keterbatasan dalam mengidentifikasi ada atau tidaknya konflik kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah. Apabila informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah tidak optimal maka urgensi dari prinsip transparansi atau keterbukaan dalam upaya pencegahan tindak korupsi hanya sekedar formalitas semata.

Ukuran Pemerintah Daerah Memoderasi Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Korupsi

Hasil pengujian pada model 2 menunjukkan ukuran pemerintah daerah (Z) memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah (X1) terhadap tingkat korupsi (Y). Hasil tersebut didukung oleh penelitian Kiswanto *et al.* (2019) yang menyatakan ukuran pemerintah daerah memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat korupsi.

Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan aset tetap daerah dapat berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan aset tetap lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahannya dengan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada sumber dana yang berasal dari eksternal daerah. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat korupsi. Optimalisasi pemanfaatan aset tetap daerah mampu memberikan kontribusi ekonomi pada daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah serta menambah kompleksitas aturan keuangan daerah.

Jumlah PAD yang besar dan kompleksnya aturan keuangan meningkatkan peluang terjadinya korupsi (Bondan, 2019). Bertambahnya kasus korupsi menunjukkan *conflict of interest* yang tinggi antara rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Sehingga semakin besar/optimal ukuran pemerintah daerah, dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang secara tidak langsung semakin tinggi pula tingkat korupsinya. Tingginya tingkat korupsi menunjukkan besarnya *conflict of interest* antara *agent* dan *principal*.

Disisi lain, dengan memoderasinya ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan aset tetap pada kemandirian keuangan daerah menunjukkan hubungan agensi yang berjalan baik. Optimalisasi aset tetap daerah yang berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan pengelolaan pemerintahan di daerah yang baik. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat khususnya pada bidang pendanaan dan ekonomi. Dengan terlaksananya mandat rakyat oleh pemerintah maka dapat mengurangi tingkat konflik kepentingan pada pengelolaan pemerintahan di daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah Memoderasi Pengaruh Investasi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi

Pengujian pada model 2 menunjukkan hasil ukuran pemerintah daerah (Z) tidak memoderasi pengaruh investasi daerah (X2) terhadap tingkat korupsi (Y). Belum ada hasil penelitian mengenai

ukuran pemerintah daerah memoderasi atau tidak pengaruh investasi daerah terhadap tingkat korupsi.

Tidak memoderasinya ukuran pemerintah daerah pada investasi daerah disebabkan ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan aset tetap daerah tidak dapat mempermudah/meningkatkan investasi daerah. Aset tetap pemerintah daerah yang optimalisasi pemanfaatannya masih dapat memberikan kontribusi pada pelayanan publik tidak memerlukan fasilitas tambahan atau *upgrading capacity* yang merupakan bentuk investasi daerah. Kemudian investasi daerah dalam skala besar memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran untuk merealisasikannya.

Berdasarkan teori agensi, tidak memoderasinya ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan aset tetap daerah pada investasi daerah mencerminkan pelaksanaan mandat yang belum baik. Aset tetap daerah yang dikelola atau dimanfaatkan harusnya dapat meningkatkan tingkat investasi di daerah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana yang secara tidak langsung berdampak pada ekonomi daerah. Optimalisasi aset daerah pada Investasi daerah dapat mempermudah pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Ukuran Pemerintah Daerah Memoderasi Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi

Hasil uji pada model 2 menyatakan ukuran pemerintah daerah (Z) tidak memoderasi pengaruh transparansi daerah (X1) terhadap tingkat korupsi. Belum ada hasil penelitian mengenai ukuran pemerintah daerah memoderasi atau tidak pengaruh transparansi daerah terhadap tingkat korupsi.

Tidak memoderasinya ukuran pemerintah daerah pada trsanparansi daerah disebabkan belum diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Daerah otomatis berdampak pada aspek transparansi informasi dan kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan aset tetap daerah. Selain itu, penyebab lainnya adalah tidak kompatibelnya aset tetap daerah dalam mendukung/memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya keterbukaan.

Dari sudut pandang teori agensi, tidak memoderasinya ukuran pemerintah daerah pada transparansi daerah menunjukkan belum terlaksananya mandat sebagaimana yang seharusnya. Aset tetap daerah apabila dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan transparansi daerah. Contoh pemanfaatan aset tetap daerah yang berpengaruh pada tingkat transparansi adalah penggunaan komputer dan perangkat *database* lainnya dalam mendukung penyampaian informasi melalui *website* Pemda DKI Jakarta (Sari, 2016). Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada

masyarakat, khususnya pada aspek akuntabilitas pemerintah kepada rakyat atas mandat yang diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan pada uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan investasi daerah dan transparansi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Kemudian ukuran pemerintah daerah memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat korupsi dan ukuran pemerintah daerah tidak memoderasi pengaruh investasi daerah dan transparansi daerah terhadap tingkat korupsi. Tingginya tingkat korupsi menunjukkan besarnya konflik kepentingan antara pemerintah (*agent*) dan rakyat (*principal*).

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian penelitian, penulis memberikan saran bagi Pemerintah Daerah, penelitian selanjutnya, dan masyarakat. Pertama, Pemerintah Daerah diharapkan mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pos-pos potensial di daerah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga diharapkan meningkatkan kualitas keterbukaan/transparansi melalui penyajian informasi yang lengkap, sebagaimana Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Kedua, bagi penelitian selanjutnya, pengukuran variabel investasi daerah disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan yang bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak korupsi dan menemukan bentuk korupsi dalam investasi daerah yang tidak dapat terdeteksi dari analisis angka semata (analisis LKPD). Kemudian berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dimana model 1 dan model 2 memiliki nilai *Adjusted R²* masing-masing 12,8% dan 18%. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel untuk lebih dapat menjelaskan variabel dependen tingkat korupsi seperti sistem pengendalian internal dan temuan audit pada pemerintah daerah. Selain itu dapat juga menggunakan variabel moderasi ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan jumlah pegawai atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lingkup pemerintah daerah.

Ketiga, masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan tindak korupsi dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah. Masyarakat dapat mengkritisi informasi yang disajikan Pemda dan implementasinya, jika ditemukan kecurangan publik dapat melaporkan atau memberikan *feedback* kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal*

- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Bondan, G. L. B. (2019). *Tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi*. Retrieved December 12, 2021, from Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) website: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi>
- Georgieva, I. (2017). *Using transparency against corruption in public procurement : a comparative analysis of the transparency rules and their failure to combat corruption* (p. 286). p. 286. Cham: Springer International Publishing AG.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota di pulau jawa). *Buletin Ekonomi*, 11(1), 1–86.
- Indonesia Corruption Watch. (2021, April 18). *Tren penindakan kasus korupsi tahun 2020*. Retrieved February 3, 2022, from Indonesia Corruption Watch website: <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, (4), 77–132. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kementerian PPN / Bappenas. (2018). *Rencana aksi keterbukaan pemerintah Indonesia*. Retrieved December 15, 2021, from Kementerian Perencanaan Pembangunan website: https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/action_plan/id/irpYqElBnHdPkDuvj62ngfxhpmg1AYb2in5hupDf.pdf
- Kim, Y. K. (2019). When it rains, it pours: foreign direct investment and provincial corruption in Vietnam. *Journal of East Asian Studies*, 19(2), 141–168. <https://doi.org/10.1017/jea.2019.12>
- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Fitriani, N. (2019). The effect of audit results and financial performance on corruption level moderated by government size. *International Journal of Economics and Business Administration*, 7(3), 250–259. <https://doi.org/10.35808/ijeba/323>
- Lafe, A. S., & Shahini, L. (2019). The impact of transparency in the fight against corruption. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 10(5), 47–53. <https://doi.org/10.2478/mjss-2019-0065>
- Nainggolan, A. T., & Purwanti, D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*, (2012),

1–26. Retrieved from [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/099.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA_XIX_(19)_Lampung_2016/makalah/099.pdf)

Patrick, P. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: the adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government* (The Pennsylvania State University). Unpublished Thesis. The Pennsylvania State University. Retrieved from https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/4828

Priatnasari, Y., & Suhardjanto, D. (2020). Regional financial characteristics and public transparency towards frequency of fraud in the local government. *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 201. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.2089>

Sari, A. D. K. (2016, March 17). *Optimalkan pengelolaan keuangan dan aset, Pemprov luncurkan 3 sistem informasi*. Retrieved February 9, 2022, from Bisnis.com website: <https://jakarta.bisnis.com/read/20160318/77/529526/optimalkan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-pemprov-luncurkan-3-sistem-informasi>

Simorangkir, E. (2017). *Kemenkeu: korupsi terbesar di pengadaan konstruksi bangunan*. Retrieved November 22, 2021, from detik.com website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3738399/kemenkeu-korupsi-terbesar-di-pengadaan-konstruksi-bangunan>

Sugiarto, E. C. (2019, August 2). *Investasi dan Indonesia maju*. Retrieved February 9, 2022, from Kementerian Sekretariat Negara website: https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju

Suyatmiko, W., & Nicola, A. (2021, January 28). *Indeks Persepsi Korupsi 2020: korupsi, repons covid-19 dan kemunduran demokrasi Indonesia*. Retrieved February 8, 2022, from Transparency International Indonesia website: <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>

Warkini, Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Akuntabilitas dan transparansi LKPD berpengaruh terhadap kasus korupsi : benarkah ? *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/AD.v4i2.8046>